

**JURNAL**

**PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN OLEH  
PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI TERHADAP PELAYAN PRIBADINYA  
DI JERMAN**



**Diajukan oleh :**

**Kadek Anggisita Mahadewi**

**NPM : 130511200**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL**

**PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN OLEH  
PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI TERHADAP PELAYAN PRIBADINYA  
DI JERMAN**



**Diajukan oleh :**

**Kadek Anggisita Mahadewi**

**NPM : 130511200**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

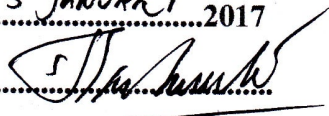
**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 23 Januari 2017**

**Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H, LL.M**

**Tanda tangan**

**: **

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FA: Endro Susilo, S.H, LL.M**

# **PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI TERHADAP PELAYAN PRIBADINYA DI JERMAN**

**Kadek Anggisita Mahadewi**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**email : anggisita95@gmail.com**

## ***Abstract***

***Abuse of immunity and privileges by Diplomatic Agents of Saudi Arabia against his personal servant in Germany***

*The purpose of this research is to investigate the abuse of immunity and privileges by diplomatic agents of Saudi Arabia against his personal servant in Germany can be penalized under Germany national law or not and acts of violence of diplomatic agents of Saudi Arabia contrary to Vienna Convention or not. A normative methods is used of this research that focus on the positive legal norms of laws. Immunity and privileges granted by the Vienna Convention of 1961 to ensure the implementation of the diplomatic function, but it does not mean the diplomatic agents can be free to act in the receiving State. As a representative of the sending State, he should respect the laws and regulations of the receiving State (Article 41 paragraph 1 Vienna Convention of 1961). One of immunity that enjoyed by diplomatic agent is immunity from criminal jurisdiction of the receiving State (Article 31 paragraph 1 Vienna Convention of 1961). If diplomatic agents violate the laws and regulations of the receiving State, he can not be penalized under national law of receiving State because he enjoy that immunity as found in Article 31 paragraph 1. In the case that occurred in 2009, a Diplomat of Saudi Arabia and his family tortured his private servant in Jerman. His private servant of the diplomat is a migrant worker from Indonesia, her named is Dewi. Diplomats of Saudi Arabia and his family do not pay wages according to agreement, tortured physically of Dewi, and hold her passport. The action of the diplomat and his family is violate the provisions of article 41 Vienna Convention of 1961. As a representative of the sending state (Saudi Arabia state), the diplomat can not be punished by national laws of Germany according in article 31 paragraph 1 on Vienna Convention of 1961.*

***Keywords : Immunity and privileges, Diplomatic agents, Vienna Convention of 1961.***

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam rangka menjalin hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan perlu dilakukan pertukaran misi diplomatik. Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan

internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri. Salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi adalah diplomat. Dalam melakukan diplomasi, wakil-wakil negara agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efisien perlu untuk diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan. Pengakuan kekebalan diplomatik pada mulanya

di dasarkan atas hukum kebiasaan internasional semata-mata, yaitu kebiasaan dalam praktek hubungan antar negara yang berlangsung dengan tukar menukar perwakilan diplomatik. Lama kelamaan kebutuhan akan adanya peraturan hukum tertulis mengenai pengakuan kekebalan diplomatik yang dapat dipergunakan secara umum oleh semua negara dirasakan mendesak. Akhirnya setelah dengan Konggres Wina Tahun 1815 yang disusul dengan Konggres Aix-La-Chapelle Tahun 1818, maka pada tahun 1961 asas kekebalan diplomatik sebagai hukum internasional dikukuhkan dalam sebuah Konvensi yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman, kekebalan tempat tinggal resmi diplomat, kekebalan diplomat dalam melaksanakan tugas kedinasan. Keistimewaan misi diplomatik dalam bidang pajak dan iuran serta pembebasan dari bea cukai. Konvensi Wina 1961 juga memberikan batasan-batasan secara hukum mengenai hak kekebalan dan keistimewaan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 36, 41 ayat (1), dan 42.

Salah satu kasus penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik terjadi di Jerman pada bulan April tahun 2009. Seorang tenaga kerja Indonesia yang memiliki nama samaran Dewi Ratnasari bekerja pada seorang Pejabat Diplomat Arab Saudi dan ia akan dibawa ke Berlin. Ia menandatangani perjanjian kerja yang mengatur upah minimal pembantu rumah tangga bagi diplomat di Jerman, yaitu 750 (tujuh ratus lima puluh) Euro sebulan untuk sekitar 6 jam sehari, dan cuti tahunan selama satu bulan. Keluarga diplomat tersebut hanya membayar upahnya sekali, yaitu sebesar 150 Euro (Rp 1,8 juta) saat Ramadhan. Dewi bekerja bagi ketujuh anggota keluarga diplomat, dari pukul 06.00 pagi sampai larut malam, tujuh hari dalam seminggu. Ia mendapat perlakuan yang tidak semestinya dari keluarga diplomat tersebut, seperti paspornya yang disita, gajinya tak dibayar, ia tak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh menghubungi

keluarga, bahkan ia sering mendapatkan pukulan dan hinaan dari keluarga Diplomat Arab Saudi tersebut. Kemudian ia meminta bantuan pada organisasi Hak Asasi Manusia yaitu Organisasi Ban Ying yang merupakan organisasi perlindungan pekerja perempuan di Jerman dan berhasil menyelamatkan diri dari apa yang telah dialaminya sekitar 19 bulan pada bulan Oktober tahun 2010. Organisasi Ban Ying, aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr serta pengacara Klaus Bertelsmann mengajukan kasus pelayan pribadi Diplomat Arab Saudi ke Pengadilan Tenaga Kerja di Berlin. Pengadilan Tenaga Kerja Jerman memutuskan menolak tuntutan itu, dengan alasan kekebalan hukum diplomatik si majikan.

### **Rumusan Masalah**

Apakah penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya dapat dituntut sanksi pidana menurut hukum Jerman dan bertentangan dengan ketentuan Konvensi Wina 1961?

### **Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Objektif  
Untuk mengetahui penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya apakah dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum Jerman dan bertentangan dengan Konvensi Wina 1961.
2. Tujuan Subjektif  
Memenuhi tugas sebagai prasyarat memperoleh gelar Strata 1 (S1).

### **Tinjauan Pustaka**

1. Pejabat Diplomatik  
Dalam Pasal 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, disebutkan:
  - (a) Kepala perwakilan ialah orang yang ditugaskan oleh Negara pengirim untuk bertindak dalam kedudukannya itu;
  - (b) Anggota-anggota perwakilan ialah kepala perwakilan dan anggota-anggota staf perwakilan;

- (c) Anggota-anggota staf perwakilan ialah anggota-anggota staf diplomatik, administrasi, teknis, dan pelayanan dari perwakilan ;
- (d) Anggota-anggota staf diplomatik" ialah anggota-anggota staf perwakilan yang mempunyai gelar diplomatik;
- (e) Seorang wakil diplomatik ialah kepala perwakilan atau seorang anggota staf diplomatik dari perwakilan.

Sugeng Istanto berpendapat bahwa perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara. Menurut Jawahir Thontowi, Duta Besar (*General Embassy*) adalah wakil diplomatik setingkat kepala negara yang mewakili suatu negara untuk tinggal dan melaksanakan tugas kenegaraan di Negara penerima (*receiving countries*), dengan berkantor di Ibukota Negara. Berdasarkan *Oxford Dictionary*, *diplomat is a person whose job is to represent his or her country in a foreign country; a person who is skilled at dealing with other people.*

Mengenai pembagian kepala misi, dalam *Satow's Guide to Diplomatic Practice: Today heads of mission are divided, as stated in Article 14 of the Vienna Convention on Diplomatic Relation of 1961, into three classes :*

- a. *Ambassadors or nuncios accredited to head of the state, and other heads of mission (such as High Commissioner in the Commonwealth) of equivalent rank;*
- b. *Envoys, ministers and internuncios accredited to head of the state;*
- c. *Charges d'affaires accredited to ministers of foreign affairs.*

## 2. Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan. Kekebalan (*immunity*) diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi hukum perdata, hukum acara, maupun hukum pidana. Keistimewaan yang dimaksud ialah berbagai hak istimewa

(*privilege*) yang melekat pada perwakilan diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di Negara penerima. Jadi, penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik adalah perbuatan menyalahgunakan hak yang diberikan atas dasar prinsip timbal balik untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas negara yang diwakilinya. Terdapat tiga teori yang membahas mengenai alasan pembenar pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik, yaitu :

- a. *Exterritoriality theory* (Teori Eksterritorialitas)

Teori ini menganggap bahwa meskipun para diplomat secara konkret ada atau tinggal di Negara penerima, tetapi secara yuridis dianggap ada di luar wilayah Negara penerima yaitu tetap tinggal di Negara pengirim. Teori ini sulit untuk diterapkan dalam kehidupan dan terdapat kejanggalan, misalnya andaikata para diplomat dianggap tinggal di Negara pengirim, maka tidak perlu memperoleh kekebalan dan keistimewaan karena tidak ada satupun negara di dunia yang memberi kekebalan dan keistimewaan mutlak pada warga negaranya sendiri di wilayahnya.

- b. *Representative Character Theory* (Teori Representatif)

Menurut teori ini, diplomat dianggap sebagai simbol atau lambang Negara pengirim sekaligus wakil Negara pengirim di Negara penerima, karena itu segala perbuatan diplomat harus dianggap sebagai perbuatan dari kepala negara atau setidaknya dianggap sebagai pencermin kehendak Negara pengirim. Teori ini juga sulit untuk diterapkan karena sampai saat ini orang yang mendapatkan kekebalan diplomatik bukan hanya diplomat, tetapi termasuk anggota keluarga diplomat yang membentuk rumah tangganya dan tinggal di Negara penerima, padahal bukan berstatus diplomat yang mewakili Negara pengirim.

c. *Functional Necessity Theory* (Teori Kebutuhan Fungsional)

Menurut teori ini, hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik perlu diberikan kepada diplomat agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga hasil pekerjaannya memuaskan Negara penerima dan Negara pengirim. Teori ini merupakan dasar teori yang paling benar dalam menjelaskan dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik karena tanpa adanya kekebalan dan keistimewaan diplomatik, diplomat tidak dapat melaksanakan fungsi di Negara penerima. Hal tersebut terdapat pada Pembukaan Konvensi Wina Tahun 1961 Alinea 4 (empat).

3. Status Pelayan Pribadi

Berdasarkan Pasal 1 huruf h Konvensi Wina 1961, pelayan pribadi adalah orang yang di dalam pelayanan domestik dari seorang anggota misi dan yang bukan pegawai Negara pengirim misi. Kekebalan dan keistimewaan tersebut diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, yaitu kekebalan dan keistimewaan pun juga dapat dinikmati oleh para pelayan pribadi anggota misi. Para pelayan pribadi anggota misi, apabila mereka bukan warga negara atau penduduk tetap dalam Negara penerima, akan dibebaskan dari pungutan dan pajak atas pendapatan yang mereka terima karena mereka dipekerjakan. Mengenai hal lain, mereka boleh menikmati hak-hak istimewa hanya terbatas pada yang diperkenankan oleh Negara penerima.

## 2. METODE

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan bahan hukum sekunder yaitu inti dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli

yang terdapat dalam literatur, hasil penelitian, internet, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu Johannes Richard Sapta Bharata sebagai pejabat yang membidangi persoalan kekebalan dan keistimewaan diplomatik di Direktorat Fasilitas Diplomatik pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat.

Bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan lima tugas ilmu hukum, sebagai berikut:

- a. Deskripsi hukum positif, yaitu menguraikan pasal-pasal dalam instrumen hukum internasional;
- b. Sistematisasi akan dilakukan secara horisontal, yaitu keserasian hukum positif agar tidak saling bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan;
- c. Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer dapat dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka;
- d. Interpretasi
  - 1) Gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum;
  - 2) Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum;
  - 3) Teleologi yaitu setiap aturan pada dasarnya mempunyai tujuan tertentu.
- e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya di Jerman.
- f. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Proses berpikir atau proses bernalar secara deduktif yaitu berawal dari preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini asas hukum atau generalisasi mengenai Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap Pelayan Pribadinya Di Jerman

a. Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Diplomatik oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi

Hak kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan individu, tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi dari perwakilan itu sendiri di Negara penerima. Salah satu hak kekebalan yang dinikmati oleh perwakilan diplomatik adalah bebas dari yurisdiksi pidana Negara penerima, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961. Merujuk pada ketentuan tersebut berarti, tidak dapat diberlakukan hukum nasional Negara penerima pada pejabat diplomatik Arab Saudi, yang berarti Pengadilan Tenaga Kerja Jerman tidak dapat mengadili diplomat tersebut karena terbentur kekebalan yang dinikmatinya. Hal itu dikuatkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1961 yang menyebutkan: "Pejabat diplomatik harus tidak boleh diganggu-gugat. Ia tidak boleh ditangkap atau dikenakan penahanan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kemerdekaan, dan martabat".

Walaupun demikian, tidak berarti tindakan pejabat diplomatik Arab Saudi beserta anggota

Diplomatik dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru berupa hasil penelitian mengenai penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya di Jerman.

keluarganya terhadap Dewi pelayan pribadinya seperti kasus diatas dapat bebas begitu saja dan tidak mendapat sanksi apapun, karena dalam ketentuan

Pasal 31 ayat (4) Konvensi Wina Tahun 1961 pada intinya mengatur bahwa pejabat diplomatik tetap tunduk pada yurisdiksi hukum Negara penerima. Bahkan terhadap pejabat diplomatik yang telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran di Negara penerima, Negara pengirim dapat menanggalkan hak kekebalan dan keistimewaan yang dinikmatinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina Tahun 1961. Sebagai perwakilan dari Negara pengirim, para pejabat diplomatik memiliki hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang tidak dapat diganggu-gugat, tetapi hal tersebut tidak membuatnya dapat berbuat sesuai kehendaknya di Negara penerima. Pejabat diplomatik tetap harus menghormati hukum dan perundang-undangan Negara penerima sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 Konvensi Wina Tahun 1961. Jerman sebagai Negara penerima dapat menyatakan *persona non grata* pada Pejabat Diplomatik Arab Saudi apabila dianggap melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan Negara penerima. Deklarasi *persona non grata* terjadi khususnya mereka yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, diantaranya:

- 1) Kegiatan-kegiatan politik atau subversif;

- 2) Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima;
  - 3) Kegiatan-kegiatan spionase;
  - 4) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961.
- b. Upaya perlindungan yang diberikan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Berlin, Jerman

Upaya-upaya dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Jerman dalam membantu Dewi ialah mendampingi untuk melapor pada polisi setempat atas apa yang telah dialami oleh Dewi, memastikan mendapatkan pelayanan medis dan psikologis yang memadai untuk memulihkan kondisinya setelah penyiksaan yang dilakukan oleh manjakannya, mencari pengacara beserta penerjemah dan memantau proses penyelidikan maupun penyidikan atas kasus yang telah dilaporkan serta membantu untuk menghubungi keluarganya atau pihak lain di Indonesia untuk memperoleh bantuan dana selama Dewi berada di luar negeri atau untuk biaya kepulangannya ke Indonesia. Selain memberikan perlindungan pada warganegaranya, yaitu Dewi, Perwakilan diplomatik juga bertugas melakukan perundingan dengan pihak dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jerman untuk meminta kerjasamanya dalam menyelesaikan kasus penyiksaan yang melibatkan pelayan pribadi berkewarganegaraan Indonesia dengan Pejabat Diplomantik Arab Saudi di Jerman dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman menyampaikan laporan kepada pemerintah Indonesia mengenai perkembangan serta penanganan terhadap masalah yang menimpa warganegaranya.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya atau berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomantik Arab Saudi Terhadap Pelayan Pribadinya di Jerman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan Pejabat Diplomantik Arab Saudi tersebut bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 karena tidak menghormati hukum nasional dan peraturan perundang-undangan di Negara tempat ia diakreditasikan.
2. Pejabat Diplomantik Arab Saudi tidak dapat dituntut menurut hukum Jerman karena sebagai perwakilan suatu Negara, pejabat diplomatik tersebut kebal dari kekuasaan hukum pidana Jerman selaku Negara penerima, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961.

### 4. REFERENSI

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU :

- Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomantik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1991, *Hukum Diplomantik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi/Hukum*, Yogyakarta.
- Jawahir Thontowi, 2016, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.



J.G.Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Lord Gore-Booth, Desmon Pakenham, 1979, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Published by Logman Inc., New York.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Penerbit Tatanusa, Jakarta.

Syahmin, Ak., 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Theodore A. Coulombis and James H. Wolfe, 1986, *Introduction to International Relation: Power and Justice Third Edition*.

Wasito, Sm.Hk., Sm.Hk, 1984, *Konvensi-Konvensi Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler Dan Hukum Perjanjian/Traktat*, Andi Offset, Yogyakarta.

Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya.

\_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi*, Penerbit CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

#### JURNAL :

Devi Dea Prastiwi, 2011, *Kewajiban Negara Penerima dalam Memberikan Perlindungan*

*Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya Dengan Prinsip Externa Rationae Khususnya dalam Kasus Indonesia Malaysia*), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Eva Novelda Kati, 2015, *Implikasi Terhadap Hubungan Diplomatik Negara pengirim Dan Negara penerima Atas Tindakan Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomatik Suatu Negara (Study Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Pejabat Diplomatik Malaysia Di Selandia Baru Pada Tahun 2014)*, Universitas Hasanuddin Makasar dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14955/SKRIPSI%20LENGKA%20HI%20NOVELDA%20KATI.pdf?sequence=1>

Laurensia A.Ano Djoko, 2012, *Tanggungjawab Negara penerima Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Diplomat Pada Warga Negara penerima (Studi Kasus Pelecehan Seksual Oleh Diplomat Belanda Terhadap Warga Negara Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### KAMUS :

*Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th Edition*.

Michael R.Purba, 2009, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Penerbit Widyatama, Jakarta.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Lampiran III mengenai Petunjuk Teknis Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri, pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri.

#### WEBSITE :

*Basic Law for the Federal Republic of Germany*, dalam  
<https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic-law-data.pdf>, diakses pada 25 November 2016.

*Daftar Pejabat dan Staff*, dalam  
<http://www.kemlu.go.id/berlin/id/tentang-perwakilan/pejabat-dan-staff.aspx>, diakses pada tanggal 26 November 2016.

Grant V. McClanahan, 1989, *Diplomatic Immunity: Principles, Practices, Problems*, C. Hurst & Co. (Publisher), London, hlm 126, dalam  
[https://books.google.co.id/books?id=oQhlua4VHrcC&pg=PP4&dq=diplomatic+immunity&hl=id&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=diplomatic%20immunity&f=false](https://books.google.co.id/books?id=oQhlua4VHrcC&pg=PP4&dq=diplomatic+immunity&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=diplomatic%20immunity&f=false), diakses pada 7 Oktober 2016.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arab\\_Saudi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi), diakses pada 18 November 2016.

*National Labour Law Profile: Federal Republic of Germany*, dalam  
[http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS\\_158899/lang-en/index.htm](http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS_158899/lang-en/index.htm), diakses pada 24 November 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam  
<http://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan>, diakses pada 14 September 2016.

Lampiran III mengenai Petunjuk Teknis Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri, pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri, dalam  
[http://pih.kemlu.go.id/files/Permenlu\\_04\\_Tahun\\_2008\\_Pelayanan\\_Warga\\_pd\\_Perwakilan\\_RI.pdf](http://pih.kemlu.go.id/files/Permenlu_04_Tahun_2008_Pelayanan_Warga_pd_Perwakilan_RI.pdf), diakses pada 26 November 2016.

*Perbudakan Di Rumah Diplomat*, dalam  
<http://www.dw.com/id/perbudakan-di-rumah-diplomat/a-15194961>, diakses pada Sabtu, 3 September 2016.

*Peta Lokasi*, dalam  
<http://kemlu.go.id/berlin/id/tentang-perwakilan/peta-lokasi.aspx>, diakses pada tanggal 26 November 2016.

Ralph G. Feltham, 2012, *Diplomatic Handbook : Eighth Edition*, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 35, dalam  
[https://books.google.co.id/books?id=oRquHggDx28C&printsec=frontcover&q=diplomatic&hl=id&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=diplomatic&f=false](https://books.google.co.id/books?id=oRquHggDx28C&printsec=frontcover&q=diplomatic&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=diplomatic&f=false), diakses pada 7 Oktober 2016.

*Teori Kekebalan Diplomatik dan Keistimewaan Pejabat Misi Diplomatik*, dalam  
<http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatikdan.html?m=1>, diakses pada 31 Agustus 2016.